

**CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI PINRANG PERIODE**

**2018-2022**

Disusun Oleh

**YUNITA**

NIM E111 14 001



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2018**



# **CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI PINRANG PERIODE**

**2018-2022**

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana

Disusun Oleh

**YUNITA**

NIM E111 14 001



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI PINRANG  
PERIODE 2018-2022**

Disusun dan diajukan oleh

**YUNITA**

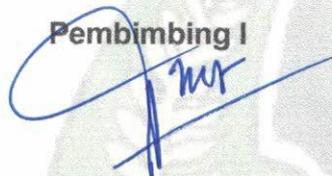
**E111 14 001**

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi pada Program Studi Ilmu  
Politik Departemen Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik  
Universitas Hasanuddin

Makassar 26 Desember 2018

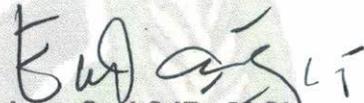
**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



**Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**  
NIP.19730813 199802 2 001

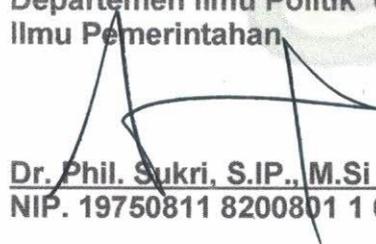
**Pembimbing II**



**Endang Sari S.I.P., M.Si**  
NIP. 19851015 201504 2 002

**Mengetahui,**

**Plt. Ketua  
Departemen Ilmu Politik dan  
Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si**  
NIP. 19750811 8200801 1 001

**Ketua Program Studi  
Ilmu Politik**



**A. Ali Armunanto, S.I.P., M.Si**  
NIP/19801114 200812 1 003

**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI PINRANG  
PERIODE 2018-2022**

Disusun dan diajukan oleh

**YUNITA**

**E111 14 001**

Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh panitia Ujian Skripsi  
pada Program Studi Ilmu Politik  
Departemen Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui**

**Tim Penguji :**

Ketua :

Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si

Sekretaris :

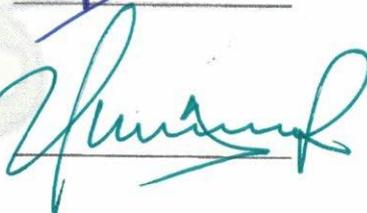
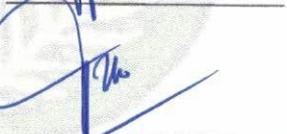
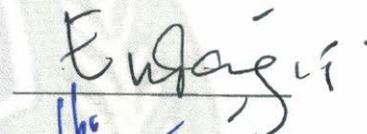
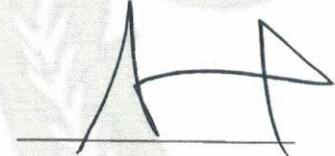
Endang Sari, S.IP, M.Si

Anggota :

Dr. Ariana Yunus, M.Si

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si



## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan tiada henti-hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada batas, telah memberikan rahmat, pengetahuan, kesabaran, keimanan dan taqwa kepada penulis. Serta sholawat dan salam selalu senantiasa tucurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta dan teristimewah yakni ayahanda Karman dan Ibunda Fatimah yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti-hentinya, terima kasih atas didikannya dan telah menjadi penyalur doa dan semangat terbesar selama ini, sehingga menjadi alasan utama skripsi ini harus terselesaikan pada waktu yang tepat. Kepada adik penulis Putri Nurasima (Ecca) terima kasih atas doa, dan dukungannya semoga kakak mu ini dibanggakan.



Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sangat berjasa dalam memberikan arahan dan support terhadap penulis, antara lain kepada:

1. Prof. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2014-2018 dan Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2018-sekarang, Ibu Dr. Gustiana Kambo, M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan periode 2014-2018 dan bapak Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan periode 2018-sekarang, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Sumber Daya periode 2014-2018 dan bapak Dr. Andi Samsu Alam, M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Sumber Daya priode dan Bapak Dr. H. Rahmat Muhammad, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2014-2018 dan bapak Dr. Hasrullah, M.Si, selaku



Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2018-  
sekarang

3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Bapak A. Naharuddin, S.IP, M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fisip Unhas.
4. Kepada Dosen Penasihat Akademik saya Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA. (almarhum), serta Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si., Terimakasih atas segala ilmu dan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan keakraban yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan.
5. Dr. Gustiana A.Kambo, M.Si, dan Endang Sari S.IP, M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan, dan bimbingan serta arahan. Terima kasih atas segala keramahannya baik selama kuliah maupun dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Hanya do'a yang dapat penulis persembahkan agar senantiasa sehat selalu serta mendapatkan curahan Rahmat dunia dan akhirat.

Penguji yang telah memberikan saran, kritik dan masukan untuk menyempurnakan penulisan dan penyusunan Skripsi ini.



7. Dosen pengajar Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA. (almarhum), Dr. Muhammad Saad, MA., Drs. H. A. Yakub, M.Si., Prof. Dr. Muhammad, M. Si., A. Naharuddin, S.IP, M.Si., Dr. Gustiana A.Kambo, M.Si., Dr. Ariana Yunus, M.Si., Ali Armunanto, S.IP, M.Si., Dr. Phil. Sukri, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah banyak membagi ilmu dan pengalaman-pengalaman kepada penulis.
8. Seluruh staf Jurusan dan Program Studi Ilmu Politik Pemerintahan serta seluruh Dosen di lingkungan FISIP maupun di lingkungan Universitas Hasanuddin yang juga telah membagi ilmu dan pengetahuannya. Semuanya penulis ucapkan terimakasih banyak.
9. Terima kasih teruntuk kedua orang tua penulis Ibu Fatimah dan Ayah Karman yang telah membesarkan serta mendidik hingga sampai pada titik ini, terlebih untuk ibu yang selalu memberi nasehat, memenuhi kebutuhan penulis hingga saat ini, serta adikku Ecca semoga kakakmu ini bisa menjadi teladan dan panutan untukmu.
10. Keluarga pondok Hijau Btp Blok c kak nana, kak mamat, kak wiwi, kak rini, kak amat, kak rian, punyol, yang selalu memberi dukungan dan nasehat dan untuk ponakan al'faith yang mengaminkan setiap doa penulis.



11. Sahabat Geng balibola sejak kecil hingga saat ini Irdha Yanti Mahmud (orr) Terima kasih telah bersedia selalu memberi dukungan selalu ada dalam suka maupun duka.
12. Sahabat sejalan masa putih abu-abu, icha, siska, hallat, uci, comong, bedo, nabhan, rikal, firman, sahabat yang selalu ada saat masa-masa tersulit terima kasih mari tetap berjalan bersama untuk menggapai cita-cita.
13. Sahabat sejalan diperantauan Ona Mariani, Harmiawati Wewi, Fausia Ramadani. Terima kasih telah sangat sabar dan setia menjadi pendengar dan penasehat pribadi dalam keluh kesahku mencapai cita dan cinta.
14. Teman se-angkatan Ilmu Politik 2014 (**Amandemen14**); Fendi (ketua angkatan), Dirwan (wakil ketua angkatan), Arno, Supri, Yusuf, Ilham, Mas Ganang, Syarfan, Yayat, Rifki, Ram, Bang Yusran, Ichwan, Bang Gaus, Guntur, Mukmin, Fajri, Ardi, Faldos, Ica, Tuti, Citra, Rahmi, Fitri, Yunita, Mba Ona, Vida, Finny, Ade, Tere, lyha, Rini, Afra, Ana, Husnul, dan Nindi. Terimah kasih telah menjadi saudara seperjuangan yang selalu bersedia dan bersetia dalam berbagi cerita suka maupun duka selama mengarungi masa-masa perkuliahan.



Kepada senior-senior, rekan-rekan dan adik-adik di KPA Expedition team organisasi rumah pertama dalam berorganisasi.

16. Kepada senior-senior, teman-teman, dan adik-adik HIMAPOL Fisip Unhas, terimah kasih telah menjadi rumah belajar yang sangat menyenangkan.
17. Kepada keluarga besar UKM Pencak Silat Panca Suci Fisip Unhas. Terimah kasih atas kekeluargaan yang penulis terima dan rasakan selama ini.
18. Teman-teman seperjuangan KKN UNHAS Ang.96 Posko Erelembang Squad Kami kuat tanpa Signal Alan, Pandi, Nyai, Oppa, om Diat, Ode, dan adiks Madinah, Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan waktu dan kenangan selama 1 bulan lebih di lokasi KKN .
19. Kepada, kak Endang dosen pembimbing sekaligus kakak terbaik seantero sospol, Terima kasih banyak sudah bersedia berbagi banyak hal terkait penelitian dan penyusunan skripsi dan sabar membimbing penulis, higgsa sampai pada titik ini.
20. Kepada teman-teman Diksar 25 Eyenfinite Ukm fotografi Unhas terima kasih telah menjadi bagian yang memberi pengalaman berharga untuk penulis.
21. Serta kepada semua insan yang telah dianugerahkan oleh Allah swt kepada saya, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Semoga kebahagiaan menjadi milik kita semua.



Akhirnya penulis tiba di bagian akhir seraya memohon maaf yang paling tulus kepada semuanya. “setiap tempat adalah rumah,maka teruslah berpetualang”. Demikian, *Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmattulahi Wabarakatuh.*

Makassar, Desember 2018

YUNITA



## ABSTRAK

**YUNITA,E11114001. *Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Pinrang Periode 2018-2022*, dibimbing oleh Gustiana A. Kambo sebagai pembimbing I dan Endang Sari sebagai pembimbing II**

Pemilihan Kepala Daerah melalui jalur perseorangan di Kabupaten Pinrang Memanfaatkan latar belakangnya sebagai seorang birokrat, dan advokad yakni pasangan Hamka-Mahmud berhasil meloloskan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang. Namun pada prosesnya terjadi perbedaan perolehan suara pasca Pilkada dengan jumlah KTP yang dikumpulkan saat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan, yakni dari ±23.636 KTP yang dikumpulkan hanya ±8.227 suara yang diperoleh

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan, dan norma. Dari hasil penelitian yang didapatkan. Perihal adanya perbedaan jumlah suara dan jumlah KTP yang dikumpulkan adalah pasangan Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid tidak maksimal dalam menggunakan modal sosialnya, dan memaksimalkan proses politiknya, misalnya tidak adanya tindak lanjut untuk mempertahankan dan mengawal massa pendukungnya hingga prorses pemilihan berlangsung pasangan ini hanya mengawal sampai pada proses pengumpulan KTP. sehingga tidak mampu menjaga suara basis massa pendukungnya dipilkada Pinrang

**Abstrak : Calon perseorangan, Pilkada Kabupaten Pinrang 2018**



## ABSTRACT

**Yunita. E11114001. Individual candidate on Pinrang Regent Electation 2018-2022. Supervised by Gustiana A. Kambo as Supervised 1 and Endang Sari as Supervised.**

Regional chief election trough Independent lane in Pinrang district us their background as a bureaucrate and advocate. That ia Hamka Mahmud, manage to pass as Pinrang regent and vice regent candedate. However, in the process there was a different vote after local election with the id cards collected in total when registered through independent lane, form 23.636 id cards collected, only 8.227 vote obtained

The thype of this research is descriptive qualitative by using social capital theory, include trust, networks, norms. From this research, we know there is a different betwen number of votes and id cards collected. Hamka Mahmud and Ahsan Wahid are not maximal to used their social capital and and maximazed their political process. For example, there ia no follow up to maintain and escort their supporter until the electation begin. This couple only escort until id cards collecting so they cant maintain their supporter votes in Pinrang local election 2018.

**id : individual candidate, Pinrang**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PEGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENERIMAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1 Teori Modal Sosial .....	13
2.2 Unsur-Unsur Modal Sosial .....	20
2.2.1 Jaringan ( <i>nertwork</i> ) .....	20
2.2 Kepercayaan ( <i>trust</i> ) .....	23
2.3 Norma ( <i>norms</i> ) .....	24
angka Pemikiran.....	26



2.4 Skema Pikir .....	27
<b>BAB III LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	28
3.2 Tipe dan dasar Penelitian .....	28
3.3 Teknik Penetapan Informan .....	31
3.4 Sumber Data .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM TENTANG HAMKA MAHMUD DAN AHSAN</b>	
<b>WAHID .....</b>	<b>36</b>
4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pinrang .....	36
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
5.1 Modal Sosial Hamka Mahmud .....	39
5.2 Proses Politik Hamka Mahmud mendapatkan dukungan .....	47
5.2.1 Alasan Hamka Mahmud Ahsan Wahid memilih jalur perseorangan .....	47
5.2.2 Faktor-faktor dalam proses politik yang membuat angka KTP dan Hasil perolehan suara Pasangan Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid berbeda .....	49



BAB VI PENUTUP .....	53
6.1 Kesimpulan .....	53
6.2 Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar nama dan nomor urut calon Bupati Kabupaten..... 7 Pinrang 2018-2022	
Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada ..... 10 Kabupaten Pinrang	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar peta Kabupaten Pinrang .....	36
-------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dan setara dalam pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung, atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang menginginkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Sistem demokrasi yang baik dalam satu negara dapat tercermin pada pemilu (pemilihan umum) di negara tersebut.

Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu dalam satu negara. Jabatan tersebut beragam diantaranya presiden, wakil presiden dan wakil rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) menyatakan Bahwa Kedaulatan berada di tangan.

dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar.<sup>1</sup> Berdasarkan hal



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

Undang tentang kedaulatan rakyat [www.kpu.go.id/koleksigambar/Riset\\_NTB.pdf](http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Riset_NTB.pdf) di  
ada tanggal 12-februari-2018 pukul 17.08 wita

tersebut dapat dimaknai bahwa sudah menjadi keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, dan merupakan suatu syarat mutlak bagi negara yang menganut sistem demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Kepala daerah (Bupati, Walikota) merupakan turunan dari pemilihan umum yang dapat dijadikan salah satu acuan terlaksananya kedaulatan rakyat tersebut, pada proses ini masyarakat dapat melakukan penyeleksian terhadap tokoh-tokoh yang akan menjadi perwakilan rakyat dalam pelaksanaan proses politik dan proses pemerintahan.

Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan kepala daerah perlu dilakukan secara lebih

dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru ini diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sehingga memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya memberikan kesempatan lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal 18 Ayat (4) tersebut tidak ada aturan yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari partai politik.<sup>3</sup>

inilah yang menjadi jalan terbuka bagi munculnya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah boleh berasal dari calon perseorangan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi *“peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik serta pasangan calon perseorangan*



---

<sup>2</sup>2013 Tinjauan Yuridis Terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2008

yang didukung oleh sejumlah orang.<sup>4</sup> Pencalonan melalui jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat.

Munculnya calon perseorangan tentunya akan mendobrak demokrasi yang selama ini didominasi oleh partai politik. Masalah partai politik saat ini adalah tidak adanya pembenahan secara serius terhadap partai politik yang menyebabkan partai politik jalan di tempat, utak-atik sistem pemilu menjadi sia-sia sebab partai politik sebagai pencipta dan hasil dari sistem pemilu, masih tetap pada ciri khas sentralistik dan non demokratis orde baru,<sup>5</sup> artinya bahwa sifat partai politik hari ini masih dipengaruhi oleh sifat partai politik dimasa orde baru yang otoriter yang mana keputusan berada ditangan penguasa.

Kondisi partai hari ini menurut persepsi masyarakat cenderung masih berpandangan negatif. Dalam berbagai jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004, secara konsisten ditemukan bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap institusi partai politik dan para



---

Undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 1 tentang pemerintah akses pada [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada 16 juli 2018  
husus rumahpemilu.org *kelembagaan partai politik tak direformasi, sebab dari buruknya an hasil pemilu dan pilkada* di akses pada <http://rumahpemilu.org/kelembagaan-partai-direformasi-sebab-dari-buruknya-pemerintahan-hasil-pemilu-dan-pilkada/> di akses pada

politisi. Dengan diperkenalkannya calon perseorangan maka akan memungkinkan lahirnya calon pemimpin dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas dari pada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Keberadaan calon perseorangan dianggap mampu memberikan variasi pilihan bagi pemilih dalam menentukan hak pilihnya sekaligus menjadi alat bagi individu masyarakat yang memiliki kemampuan, tingkat keterpilihan, dan kompetensi mempunyai tetapi bukan anggota partai politik, untuk ikut serta dalam bursa pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.<sup>6</sup>

Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) menjadi pesta demokrasi yang disambut antusias oleh masyarakat yang ada diberbagai daerah di Indonesia tepatnya pada bulan Juni lalu yaitu tanggal 27 Juni 2018 telah terselenggara pilkada serentak yang diikuti oleh sebanyak 171 daerah di Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Dari 171 daerah tersebut terdapat 17 provinsi 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada di tahun 2018. Rincian Nama Provinsi, Kota dan Kabupaten yang berpartisipasi pada penyelenggaraan pilkada di tahun 2018 (lampiran 1).<sup>7</sup>



---

<sup>6</sup> *ran pers meneropong calon perseorangan di pilkada serentak 2018* Perkumpulan untuk Demokrasi edisi rabu, 29 november 2017  
<sup>7</sup> *lah daerah yang akan berpartisipasi pada pilkada di tahun 2018 di Indonesia* [politik.com/news/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada - 27-juni-2018](http://politik.com/news/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-27-juni-2018)

Maju melalui jalur perseorang atau independen dalam pilkada tidaklah mudah para calon pemimpin harus mematuhi peraturan yang telah diatur oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang tertuang dalam aturan nomor 3 Tahun 2017 pasal 8 tentang Pencalonan jalur Perseorangan. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dimuat dalam pasal 10 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT terakhir sampai 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10% dukungan
2. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT terakhir lebih dari 250.000 jiwa- 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% dukungan
3. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT terakhir lebih 500.000 jiwa- 1 juta jiwa harus didukung 7,5% dukungan
4. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT terakhir lebih dari 1 juta jiwa harus didukung 6,5% dukungan



Dengan kata lain jumlah dukungan untuk calon pereorangan ditingkat kabupaten/kota harus tersebar dilebih dari 50% kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Salah satu daerah yang telah melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 adalah Kabupaten Pinrang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, pilkada Kabupaten Pinrang telah terlaksana pada bulan Juni lalu yang diikuti oleh empat orang pasang calon Bupati dan Wakil Bupati. Pilkada Kabupaten Pinrang memiliki jumlah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) terakhir sebanyak ±276.782 orang dari jumlah wilayah sebanyak 12 kecamatan.<sup>8</sup>

Tabel 1. Daftar nama dan nomor urut calon Bupati Kabupaten Pinrang  
2018-2022

No. Urut	Nama Calon Bupati/ Wakil Bupati
1.	Abd. Latif/ Usman Marham
2.	Andi Irwan Hamid/ Alimin
3.	Jamaluddin Jafar Jerre/ Andi Sofyan Nawir
4.	Hamka Mahmud/ Ahsan wahid (calon Independen)



emilih DPT terakhir kab.pinrang <http://infopemilu.go.id/informasi-pilihan> di kunjungi  
Maret 2018 pukul 16.46 Wita

Pasangan nomor urut empat Hamka Mahmud-Ahsan Wahid adalah pasangan calon bupati Pinrang yang maju melalui jalur peseorangan setelah mengumpulkan berkas dukungan sebanyak 23.636 berkas dukungan.<sup>9</sup> Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Pinrang memunculkan satu pasangan yang maju melalui jalur independen yakni pasangan Hamka Mahmud - Ahsan Wahid. Jalan pasangan Hamka Mahmud - Ahsan Wahid Maju melalui jalur independen tidaklah mudah karena pasangan ini harus memenuhi persyaratan maju pilkada lewat jalur independen yang ditetapkan oleh komisi pemilahan umum (KPU) dalam hal ini di Kabupaten Pinrang harus mendapatkan pernyataan dukungan minimal 8,5% atau 23.000 lampiran foto copy ktp dari jumlah DPT terakhir.<sup>10</sup> Sementara berkas lampiran foto copy ktp yang berhasil dikumpulkan oleh pasangan Hamka Mahmud- Ahsan Wahid sebagai prasyarat maju melalui jalur independen adalah sebanyak ±23.636

Hamka Mahmud adalah putra daerah yang juga merupakan alumni S1 universitas Hasanuddin tahun 1984-1989 dan alumni S2 dari kampus yang sama, serta seorang birokrat yang telah lama berkarir di Kabupaten Pinrang itu dibuktikan dengan riwayat pekerjaannya. sementara wakilnya Ahsan Wahid adaah alumni fakultas hukum universitas muslim Indonesia



---

berkas dukungan pasanagan calon bupati pinrang hamka Mahmud di akses pada [assar.tribunnews.com/2017/12/14/maju-jalur-independen-di-pilkada-pinrang-ini-biodata-hamka-mahmud](http://assar.tribunnews.com/2017/12/14/maju-jalur-independen-di-pilkada-pinrang-ini-biodata-hamka-mahmud) pada 16 juni 2018  
syaratn jumlah dukungan calon independen di kabupaten pinrang diakses pada [tribunnews.com/2017/03/23/ini-syarat-maju-independent-pilkada-pinrang](http://tribunnews.com/2017/03/23/ini-syarat-maju-independent-pilkada-pinrang)

(UMI) tahun 1990an. Yang juga merupakan seorang advokat dan praktisi hukum yang bergabung dengan ormas karya peduli bangsa yang disebut oleh jenderal Hartono dan dijabat sebagai wakil sekjen. Dan juga sekjen Himpunan Masyarakat Ilmu Hukum Indonesia (HIMAHI).

Calon perseorangan yang muncul di Kabupaten Pinrang adalah hal baru di Kabupaten Pinrang, dikarekan selamanya proses politik dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang didominasi oleh partai politik kemunculan Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid menjadi warna baru pada pilkada Kabupaten Pinrang

Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid menunjukkan bahwa mereka memiliki dedikasi untuk Kabupaten Pinrang terutama Hamka Mahmud di Bidang Pemerintahan Kabupaten Pinrang, hal inilah yang bisa dijadikan acuan bagi keduanya untuk maju pada pilkada Kabupaten Pinrang tahun 2018 yang lalu, walaupun hasil yang diperoleh belum memenangkan pasangan Hamka-Mahmud dan Ahsan Wahid yang maju melalui jalur independen tersebut. Adapun hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati Pinrang untuk masa jabatan 2018-2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pinrang

No	Nama Pasangan Calon Bupati	Total Perolehan Suara
1.	Abd. Latif- Usman Marham	81087
2.	A. Iwan Hamid – Alimin	86256
3.	Jamaluddin Jafar Jerre- Andi Sofyan	37454
4.	Hamka Mahmud- Ahsan Wahid	8277

Data diatas menunjukkan perolehan suara untuk calon Pemimpin daerah Kabupaten Pinrang (Bupati/Wakil Bupati) yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 yakni andi. Irwan Hamid- Alimin. Adapun rekapitulasi suara yakni sebagai berikut : (Lampiran 2)

pasangan nomor urut 1 yakni pasangan Abd. Latif - Usman Marham mengumpulkan jumlah suara sebanyak ±81.087 dan pasangan nomor 2 Andi Iwan Hamid- Alimin mengumpulkan jumlah seuara sebanyak ±86.256 dan pasangan nomor 3 yakni pasangan Jamaluddin Jafar Jerre- Andi Sofyan Nawir mengumpulkan jumlah suara ±37.454 serta pasangan nomor urut 4 pasangan Hamka Mahmud- Ahsan Wahid mengumpulkan jumlah suara **8.277** dari total suara sah 213.074.

Dari data tersebut yang menarik adalah pasangan nomor urut 4 yang merupakan pasangan yang maju melalui jalur perseorang atau independen

atkan jumlah suara sah pada pemilihan Bupati Pinrang tahun 2018 signifikan degan total dukungan yang mereka peroleh melalui lampiran



foto copy ktp sebagai prasyarat maju melalui jalur perseorangan yang pada saat itu mereka berhasil mendapatkan dan mengumpulkan dukungan sebanyak **23.636 jumlah KTP**. fakta inilah yang menjadi dasar penulis untuk membuat tulisan dalam bentuk skripsi berjudul **“Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Pinrang Periode 2018-2022”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses politik calon perseorangan Hamka Mahmud-Ahsan Wahid dalam memperoleh dukungan pada pemilihan Bupati Pinrang periode 2018-2022 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses politik pasangan Hamka Mahmud- Ahsan Wahid mendapat dukungan pada pemilah bupati Pinrang untuk periode masa jabatan 2018-2022 terlebih mereka maju melalu jalur perseorangan (independen).

## 1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademis :
  - a. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin melihat faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.



b. Memperkaya Khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memberikan Masukan Terhadap Studi tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih salah satunya Tingkat Pendidikan

- Manfaat Praktis

a) Sebagai bahan masukan untuk membantu para pelaku politik, dan sumbangan pemikiran untuk memperkokoh demokrasi diberbagai daerah.

b) Sebagai Salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik.



## BAB II

### TIJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa konsep dan teori yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti peneliti mencoba menjadikan konsep dan teori tersebut sebagai alat analisis tentang calon perseorangan pada pemilihan Bupati Pinrang periode 2018-2022 untuk lebih jelas maka peneliti menggunakan teori modal sosial.

#### 2.1 Teori Modal Sosial

Teori modal sosial pada intinya merupakan teori yang paling tegas, yang penelitiannya adalah soal hubungan, dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaga hubungan itu agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak mampu mereka lakukan sendirian, atau yang dapat mereka capai tapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jaringan tersebut menjadi sumber daya, dia dapat dipandang sebagai modal.<sup>11</sup> Modal sosial sangat penting dimiliki oleh seorang aktor politik karena bisa memberi manfaat langsung misalnya saat pencalonan aktor dalam proses politik modal sosial bisa

an untuk mendapat dukungan bagi aktor politik tersebut semakin  
kita mengenal orang, serta semakin banyak kita memiliki kesamaan

---

11. "Modal Sosial", Bantul: Kreasi Wacana, 2010, hlm 1



cara pandang dengan seseorang, maka semakin kaya modal sosial yang kita miliki.

Modal sosial (social capital) awalnya dipahami sebagai suatu bentuk dimana masyarakat menaruh kepercayaan terhadap komunitas dan individu sebagai bagian didalamnya, mereka membuat aturan kesepakatan bersama sebagai suatu nilai dalam komunitasnya, disini aspirasi masyarakat mulai terakomodasi, komunitas dan jaringan local (kelembagaan) teradaptasi sebagai suatu modal pengembangan komunitas dan pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup> Artinya bahwa modal sosial menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka melalui komunitas dan jaringan lokal.

Menurut James Coleman<sup>13</sup> mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki ciri yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial. Dalam pengertian ini modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial.

Menurut Robert D Putnam<sup>14</sup> seorang ilmuan Amerika mendefenisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan,



---

si Ritami,2016, *Peran Modal Sosial Dalam Memperkuat Strategi bertahan hidup*  
g Batu (studi kasus dikelurahan Sepancar Lawan Kulon, Kecamatan Batu Raja Timur,  
Selatan, Hal 14  
4  
16

norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.

Lebih lanjut Putnam<sup>15</sup> mengatakan modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja, sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial dengan mengacu pada ciri-ciri organisasi sosial seperti jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan, akan memfasilitasi masyarakat untuk sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. **Jaringan sosial** merupakan hubungan sosial yang terjalin secara teratur, konsisten dan berlangsung lama, hubungan tersebut bukan hanya melibatkan individu melainkan banyak individu. **Kepercayaan** adalah sesuatu yang terbangun dari hubungan-hubungan sosial yang dimana terdapat peraturan yang dapat dirundingkan, artinya terdapat ruang terbuka dari peraturan tersebut untuk mencapai hal yang ingin dicapai. Sedangkan **norma** merupakan aturan yang melekat dalam suatu hubungan sosial yang berfungsi sebagai kontrol dari suatu aktivitas.

Robert D. Putnam (1993 :169) seorang ahli Ilmu Politik asal Amerika mendefenisikan Modal sosial sebagai *Features of Social Organisation, such as Trust, Norms, and Networks, than tan improve the efficiency of facilitating* *ted actions* (Sesuatu karakteristik yang ada di dalam organisasi



sosial, semisal kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang terkordinasikan).<sup>16</sup>

Defenisi pertama Putnam ini disampaikan pada saat Putnam melakukan riset tentang tradisi politik di Italia. Artinya, partai politik akan menjadi partai yang besar, kuat, dan terus Berjaya, apabila bisa membangun tiga hal, yaitu kepercayaan, norma yang berlaku dan ditaati bersama, dan jaringan yang kuat. Pada tahun 1996, Putnam sedikit merevisi definisinya sebagai berikut fitur-fitur kehidupan sosial, semisal jaringan, norma, dan kepercayaan yang kesemuanya bisa digunakan oleh partisipan untuk berbuat bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.<sup>17</sup>

Defenisi Putnam tentang modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.<sup>18</sup> Gagasan inti dari modal sosial adalah jaringan sosial yang memiliki nilai, kontak sosial yang mempengaruhi produktifitas individu dan kelompok.

Namun pada tahun 2002 Putnam melakukan riset tentang *sosial connection* (keterhubungan sosial) di masyarakat Amerika dan kemudian mendefenisikan masyarakat sebagai berikut Ide utama dari modal sosial adalah sangat sederhana tentang jaringan sosial, bahwa jaringan sosial dan



---

d, *Sosial Capital*, Roudledge, Canada, USA, 2008, hal.4  
l. 35  
l. 51

norma –norma terkait resiprositas (saling memberi, saling merespon) sebagai modal sosial, karena seperti modal fisik dan modal manusia (peralatan dan training), jaringan sosial menciptakan nilai bagi dua pihak, individu dan kelompok, dan arena kita bisa melakukan investasi dalam jaringan. Jaringan sosial adalah tidak hanya investasi barang semata, akan tetapi suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya individu dan organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti kesamaan nilai, visi, ide teman dan keluarga.<sup>19</sup>

Definisi lain terkait modal sosial dikemukakan oleh Hasbullah mengatakan unsur pokok dalam modal sosial yaitu<sup>20</sup>:

#### 1. Jaringan sosial

Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaan (*civility*). Kemampuan anggota atau kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.



---

utnam, *Democracies in flux* *The evolution of social Capital in Contemporary*

xford University Press, Inc, New York, USA, 2002.

n, *social Kapital Menuju Keunggulan Budaya Manusia* Indonesia, Jakarta: MR-united

Hal 44-45

## 2. Kepercayaan

Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama, hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

## 3. Norma sosial

Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diakui oleh masyarakat dalam suatu etnis sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terlembagakan, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang hubungan yang melekat satu dengan yang lain yang berdampak positif

bagi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu norma sosial disebut

sebagai salah satu modal sosial

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa



pengertian modal sosial merupakan sumber daya yang muncul dan ada pada diri seorang aktor politik dari hasil interaksi dalam suatu kelompok, baik individu dengan kelompok, ataupun institusi, yang dapat melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan yang timbal balik, dan jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang membentuk struktur masyarakat yang berguna untuk saling bekerja sama. Ikatan emosional tersebut dapat menjadi perekat bagi masyarakat dan aktor politik untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial akan tumbuh dan berkembang apabila di gunakan bersama-sama.

Dalam konteks modal sosial untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap seorang aktor politik, dalam hal ini Hamka Mahmud yaitu dengan cara menciptakan kerja sama yang baik. hal itu dibuktikan dalam riwayat pekerjaan Hamka Mahmud seperti saat dia menjabat sebagai kepala bagian kepegawaian daerah Kabupaten Pinrang, Camat Paleteang Kabupaten Pinrang, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang dan lain-lain hal tersebut menunjukkan bahwa Hamka Mahmud mampu bekerja sama dalam satu organisasi dan mampu mendapat kepercayaan atas jabatan-jabatan yang pernah diperolehnya.

Modal sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap jaringan yang menjadi penting untuk dimiliki oleh aktor politik dalam hal ini Hamka Mahmud untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, lebih ia maju melalui jalur perseorangan atau independen.



## 2.2 Unsur-Unsur Modal Sosial

### 2.2.1 Jaringan (*Network*)

Jaringan sosial salah satu unsur dari modal sosial, dimana jaringan digunakan sebagai sumber daya untuk mendapatkan sesuatu dalam lingkungan sosialnya melalui hubungan sosial. Jaringan memiliki peran penting dalam modal sosial yang dimiliki seseorang seperti yang dikemukakan Bourdieu, modal sosial merepresentasikan agregat sumber daya aktual dan potensial yang bertahan lama.<sup>21</sup> Jadi, Jaringan merupakan salah satu yang penting dalam modal sosial yang dimiliki oleh seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya.

Ruddy Agusyanto dalam bukunya “jaringan sosial dalam organisasi” menyatakan bahwa, jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Berpijak pada jenis ikatan ini, maka secara langsung atau tidak langsung yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia (*person*).<sup>22</sup> Selanjutnya, Ruddy Agusyanto juga melengkapi definisi tentang jaringan sosial, hubungan sosial bisa dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara satu orang (*titik*) dengan orang lain dimana melalui



al.26

Agusyanto, *jaringan sosial dalam organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, Hal.13

jalur atau saluran tersebut bisa dialihkan sesuatu.<sup>23</sup> Dapat ditarik suatu defenisi mengenai jaringan sosial yaitu suatu hubungan sosial yang melibatkan sekelompok orang dengan nilai-nilai atau norma-norma informal disamping nilai dan norma yang diperlukan untuk menghubungkan orang yang dipandang sebagai suatu saluran untuk menjembatani.

Studi mengenai jaringan sosial termasuk ke dalam kajian sosiologi mikro karena menganalisis dari tingkat individu hingga tingkat kelompok. Teori jaringan menfokuskan analisisnya pada ikatan yang menghubungkan pelaku dengan struktur yang lebih luas.<sup>24</sup> Jaringan sosial meliputi aktor (Individu) sebagai pelakunya yang kemudian berhubungan sosial baik dengan individu lain ataupun kelompok bisa dikatakan sebagai ikatan atau ties. Begitupun menurut analisis jaringan sosial, setiap pelaku bisa terkait antar satu dengan yang lainnya.

Jaringan yang dimiliki orang benar-benar penting seperti yang di ungkapkan oleh Pameo, yang penting bukanlah apa yang kamu ketahui, namun siapa yang kamu kenal. Artinya apa dan siapa yang anda kenal dan ketahuilah yang bermanfaat. Namun dengan mengenal orang saja belum cukup, karena mereka belum tentu merasa ingin membantu anda. Jika orang ingin membantu sesamanya, mereka perlu merasa senang melakukannya,

artinya bahwa mereka perlu merasa memiliki kesamaan satu sama lain.



14

George dan Douglas j Goodman. *Teori sosiologi modern* (Edisi keenam Jakarta: Kencana) 382-383

Jika memiliki kesamaan nilai, mereka lebih cenderung bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>25</sup>

Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Pada awalnya, gagasan yang menggambarkan ikatan sosial sebagai bentuk modal hanya sekedar metafora. Metafora ini berarti hubungan bisa jadi menguntungkan; seperti halnya bentuk modal lainnya, anda dapat berinvestasi didalamnya, dan anda boleh berharap akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut.<sup>26</sup>

Konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus. Setiap individu dapat bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan kesulitan yang kita anggap besar. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerja sama, pertukaran sosial, dan saling percaya. Termasuk

norma yang mendasari hubungan sosial. Modal sosial merupakan



3  
18

sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru atau kekuatan sosial.

### 2.2.2 Kepercayaan (*Trust*)

Menurut pendapat Fukuyama dalam buku John field kepercayaan (*trust*) merupakan dasar tatanan sosial, tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya.<sup>27</sup> *Trust* atau saling percaya merupakan komponen penting dari adanya masyarakat. Masyarakat yang pada anggotanya tidak saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub komponen dari *trust* menghargai dan saling jujur.

Kepercayaan muncul jika suatu kelompok terdapat nilai (*shared Value*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Sedangkan Krech menyatakan bahwa kepercayaan merupakan gambaran sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra.<sup>28</sup> Kepercayaan lebih mudah untuk tumbuh diantara orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengubah kepercayaan individu daripada mengubah kepercayaan suatu kelompok.

Sementara Eric M. membagi kepercayaan menjadi dua yaitu

yaan moralistic dan kepercayaan strategis. Kepercayaan moralistik



---

. cit. Hal.102  
o *Teori-Teori Psikologi sosial* (Jakarta:2006)

adalah tentang bagaimana seharusnya orang lakukan. Sementara Kepercayaan strategis adalah harapan kita tentang apa yang akan dilakukan oleh seseorang.<sup>29</sup> Kepercayaan moralistik merupakan keyakinan bahwa orang lain memiliki nilai-nilai dasar moral dan karena itu harus diperlakukan seperti kita inginkan. Nilai-nilai tersebut dapat disampaikan bervariasi dari satu orang ke orang lain. Hal terpenting adalah rasa koneksi dengan orang lain karena kita melihat mereka sebagai anggota komunitas yang berdasarkan kepentingan yang harus ditanggapi dengan serius. Bukan berarti kepercayaan strategis bersifat negatif akan tetapi didasarkan pada ketidakpastian.<sup>30</sup>

### 2.2.3 Norma (Norms)

Pengertian norma yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat atau seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dari para anggota dan ada sanksi nyata dari pelanggaran yang terjadi. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut berbeda-beda. Dikenal dengan empat pengertian yang disusun berdasarkan kekuatannya dari yang paling lemah hingga yang paling mengikat antara lain: cara (Usage), kebiasaan (Folkways), tata kelakuan (Mores).<sup>31</sup> Artinya norma sosial adalah suatu aturan yang menjadi acuan dalam masyarakat bertingkah laku.



Jika norma dalam masyarakat dilanggar oleh seseorang maka, si pelaku akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Norma sosial sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi masyarakat maupun dalam komunitas. Jika norma sosial tidak ada dalam suatu masyarakat, maka akan timbul dua masalah seperti yang diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya masalah yang akan timbul dari tidak adanya norma, masalah pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan aturan sosial bukanlah semata-mata kekangan sewenang-wenang atas pilihan individu sebaiknya, itulah prasyarat dari berbagai kerja sama. Masalah yang kedua akan berakhirnya komunitas jika aturan atau norma sosial tidak ada.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya sebagai wujud kesewenang-wenangan dari penguasa namun, norma ini juga merupakan suatu yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas. Jika sebuah komunitas atau organisasi tidak memiliki aturan maka sama saja tidak diakuinya pengurus dari komunitas atau organisasi tersebut. Selanjutnya bila suatu komunitas atau organisasi tidak memiliki norma sosial yang mereka buat dan patuhi bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Maka komunitas atau organisasi tersebut tidak akan berumur panjang lagi.



---

a, Francis, *Guncangan Besar: Kodrat manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: Gramedia  
ama,2005. Hal. 17-18

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pemilihan kepala Daerah (PILKADA ) menjadi pesta demokrasi yang disambut antusias di beberapa daerah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Pinrang yang diikuti oleh empat pasang calon Bupati dan Wakil Bupati, yang menarik adalah pasangan nomor urut empat yakni pasangan Hamka Mahmud dan Ahsan Wahid yang maju melalui jalur perseorangan (INDEPENDEN) yang mana selama ini pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) didominasi oleh partai politik. Kemunculan calon perseorangan ini dianggap mampu menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk memilih disaat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hari ini mulai berkurang. Disamping tentunya orang-orang yang maju melalui jalur perseorang dalam proses politik harus memiliki modal sosial yang cukup. Modal sosial dalam hal ini adalah jaringan sosial, kepercayaan, dan norma untuk mendapatkan suara rakyat. Modal sosial tersebut tentunya tidak muncul begitu saja melainkan dibentuk melalui pengalaman seseorang.



2.4 Skema Pikir

